LAPORAN PP 39
Tahun 2022

TRIWULAN II

Inspektorat Jenderal

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan II Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk melihat besaran sasaran keuangan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan II tahun 2022.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 14 Juli 2022

INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal 1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program 1
I.3. Struktur Organisasi 2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN 9
A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 9
B. Sasaran Program/Kegiatan TA 2022 14
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 18
III.1. Hasil yang Telah di Capai. 18
III.2. Analisa Capaian Kinerja 20
III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 40
III.4. Langkah Tindak Lanjut 40
BAB IV. PENUTUP 41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal 14

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal……...15

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 11

Tabel 4 Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2022…....19

Tabel 5. Realisasi Anggaran Berdasarkan Data SPAN 30 Juni 2022..... 20

Tabel 6. Hasil Evaluasi SAKIP Unit Eselon II Inspektorat Jenderal 35

Tabel 7 Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal TW II 2022 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal 2

Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I 5

Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II 5

Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III 6

Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV..... 7

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga

sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

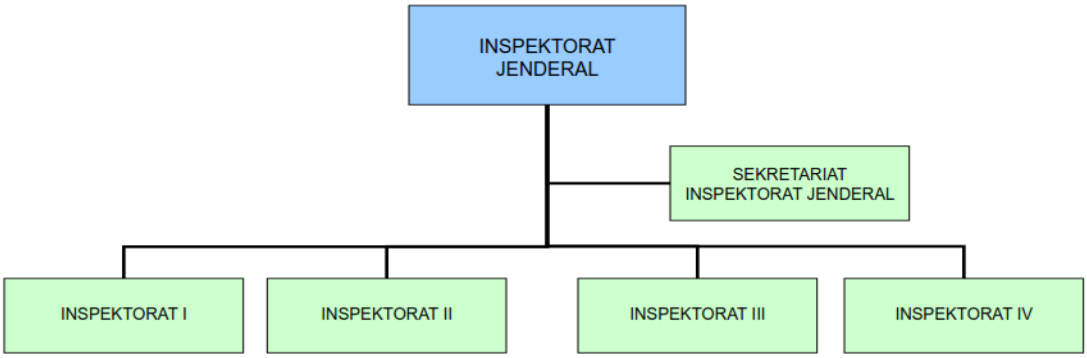

Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen

kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha
   - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang, yang terdiri dari:
  a) Auditor Utama: 1 orang;
  b) Auditor Madya: 1 orang;

c) Auditor Muda: 6 orang;

d) Auditor Pratama: 7 orang.

- Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :

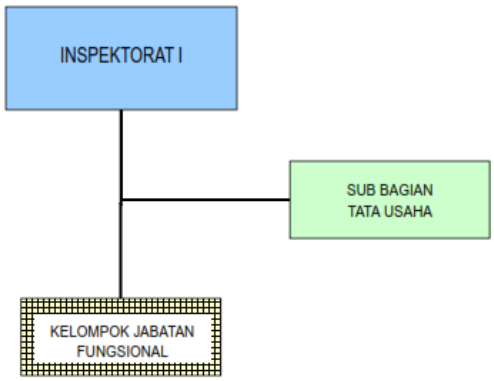

Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
   - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
   - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2022 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

a) 1 (satu) orang Inspektur;
b) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
c) Auditor: 14 orang;
d) Pelaksana: 2 orang.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :

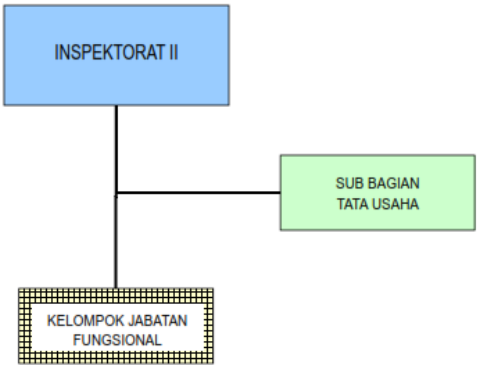

Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Indutri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

   Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :

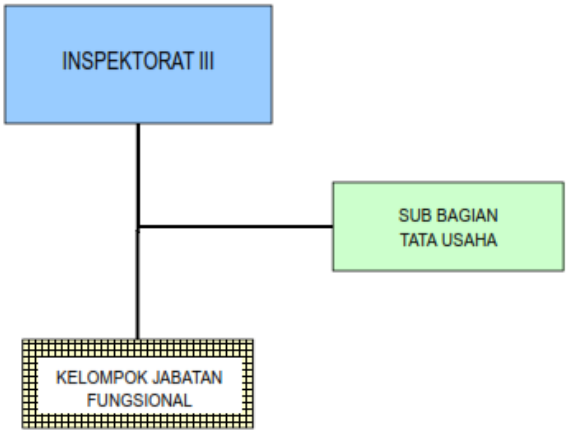

Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

   Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :

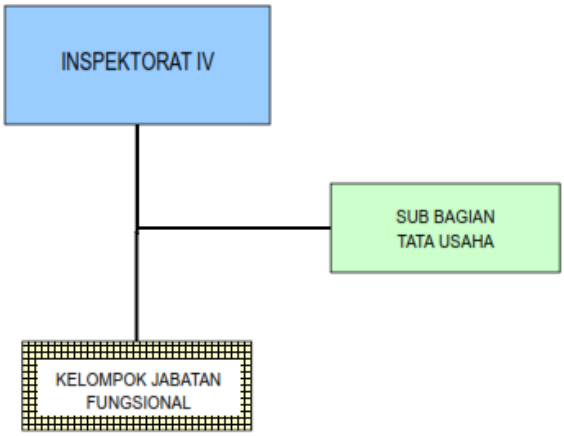

Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan ”Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.*

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *"Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional"* yang bercirikan:

1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat I - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat I - Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I - Monitoring dan Evaluasi pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I - Konsulting dan Pengawalan pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 155 Dokumen
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat II - Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II - Monitoring dan Evaluasi pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II - Konsulting dan Pengawalan pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 23 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat III - Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III - Monitoring dan Evaluasi pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III - Konsulting dan Pengawalan pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 114 Dokumen
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV - Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV - Konsulting dan Pengawalan pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 31 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
5	Pengelolaan Manajemen Keseretariatan Bidang Pengawasan Internal	- Layanan Hukum - Layanan Hubungan Masyarakat - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal	- 2 Dokumen - 3 Laporan - 6 Dokumen -1 Laporan - 12 Bulan -1 Layanan -105 Pegawai - 1 Laporan -10 Dokumen - 12 Bulan - 1 Dokumen

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2022 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp40.643.630,00,00.

B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	72%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui *self assessment* atau penilaian dari BPKP	Level	3

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,3 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasI
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	72%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan *Quality Assurance* BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3.		3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner,Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	Realisasi Capaian PenggunaanProduk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)= $\frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	76%	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus: Er = SRe Ts Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.4	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	7.1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, rencana aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2022 terlampir pada dokumen ini.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Pada Triwulan II dilakukan revisi POK ke-3 sampai dengan revisi ke-5, dan tidak merubah pagu awal sebesar Rp 40.643.630.000. Revisi ketiga dan keempat dilaksanakan pada tanggal 8 April dan 27 Mei 2022, revisi ini merupakan pemutakhiran pedoman operasional kegiatan yang di alokasikan untuk optimalisasi pencapaian sasaran program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien dengan indikator kinerja Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal. Alokasi anggaran ini digunakan untuk penyediaan laptop dan server sebagai upaya meningkatkan dukungan pengawasan secara online. Serta Revisi kelima dilaksanakan pada 16 Juni 2022.

Penyusunan Pagu Indikatif tahun 2023 dengan progress sudah mencapai 100%. Pada bulan Juni terdapat instruksi untuk melakukan *Automatic Adjustment* ke-2 Tahun 2022 terhadap pagu anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 53.005.000,- sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor B/60/SJ-IND/PR/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022. Proses revisi ini sampai dengan minggu pertama Juli 2022 masih melalui proses penelitian dan reviu APIP serta menunggu arahan Biro Perencanaan untuk melakukan submit ke DJA Kementerian Keuangan.

Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan II ini mayoritas merupakan kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan selanjutnya, persiapan ini telah terlaksana dengan baik. Dengan adanya penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2022 yang menjadi Level satu. Pelaksanaan WFO telah meningkat dengan komposisi pegawai WFO 75%, efisiensi pelaksaan kegiatan perkantoran memang sebaiknya masih perlu dilakukan mengingat kasus Covid-19 di dunia belum berakhir.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian pada Triwulan II Tahun 2022 (April-Juni) mencapai Rp. 17,939,521,748,- atau 44.14 % dari total pagu anggaran sebesar Rp.40.643.630.000,-. Jumlah anggaran yang di blokir hingga triwulan II ini cukup signifikan nilainya, yaitu mencapai Rp 5,181,546,000,- atau mencapai 29.57% dari total dana yang tersedia saat ini. Komposisi jumlah anggaran yang terblokir paling banyak terjadi pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan diikuti oleh Inspektorat IV. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2022

Sumber data: SPAN Per 30 Juni 2022

	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia	
		Keuangan (Rp.)	%			J u m l a h (Rp)	%
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.108.753.000	1.234.731.139	58,55	225.000.000	0	649.021.861	30,77
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.050.000.000	1.153.823.966	56,28	225.000.000	0	671.176.034	32,74
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2.050.000.000	1.009.536.710	49,25	225.000.000	0	815.463.290	39,77
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2.050.000.000	669.705.196	32,67	878.310.000	0	501.984.804	24,48
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	32.384.877.000	13.871.724.737	42,83	3.628.236.000	0	14.884.916.263	45,96
T O T A L	**40.643.630.000**	**17.939.521.748**	**44,14**	**5.181.546.000**	**0**	**17.522.562.252**	**43,11**

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 30 Juni 2022

No	Kode | Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 | Belanja Pegawai	18,233,377,000	7,740,878,400	42.45	0	1,379,803,000	9,112,695,600
2	52 | Belanja Barang	21,266,323,000	9,722,027,348	45.72	0	3,478,743,000	8,065,552,652
3	53 | Belanja Modal	1,143,930,000	476,616,000	41.66	0	323,000,000	344,314,000
Jumlah		**40,643,630,000**	**17,939,521,748**	**44.14**	**0**	**5,181,546,000**	**17,522,562,252**
Sumber Data: SPAN per 30 Juni 2022		*Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto*					

III.2. Analisa Capaian Kinerja

Pada Triwulan II ini mayoritas kegiatan yang dilaksanakan merupan kegiatan persiapan dan bersifat koordinasi, hal ini dapat dilihat pada rincian kegiatan yang telah dilaksanakan pada April hingga Juni 2022 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Pimpinan

a. Rapat Koordinasi Pengawasan penyediaan Minyak Goreng Sawit Curah (MGSC) untuk kebutuhan masyarakat, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

b. Rapat dengan agenda peran PPNS dalam pengawasan MGSC mengacu pada Permenperin No. 8 Tahun 2022;
c. Mewakili Menteri Perindustrian menghadiri undangan Live Lunch Talk TVone dengan tema 1001 cara atasi krisis minyak goreng;
d. Menghadiri sebagai Pansel JPT Kemenperin mendampingi Menteri Perindustrian hadir dalam wawancara seleksi terbuka JPT Kemenperin calon Kepala BBPK;
e. Mewakili Menperin menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Penanggulangan Penyelunduan Komoditas BBM dan CPO;
f. Rapat Pimpinan terkait restrukturisasi Balai-Balai Kementerian Perindustrian;
g. Bersama dengan Satgas Pangan Polri, Dirjen Agro, serta Tim Pengawas Penyediaan MGSC sidak ke Pasar Cipete dan distributor;
h. Pengawasan penyediaan MGSC di wilayah Semarang;
i. Rapat internal terbatas evaluasi MGSC bersubsidi;
j. Rapat pimpinan terkait penyampaian hasl riset tema dan konsep branding partisipasi Indonesia pada Hannover Messe 2023 di Ruang Rapat Nuri Kemenperin.
k. Rapat pimpinan terkait laporan kajian harga gas bumi bagi industri
l. Koordinasi Pengawalan Kegiatan Hannover Messe di Jerman;
m. Koordinasi Audit Kinerja Atase Perindustrian di Brussel;
n. Menghadiri Pembukaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2022 dengan Komisi VII DPR RI;
o. Menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2022 dengan Komisi VII DPR RI;

p. Menghadiri RDP Pembahasan RKA/K-L anggaran Itjen dengan Komisi VII di Hotel Sheraton;
q. Rapat Internal Pimpinan Menteri Perindustrian (tatap muka) dengan agenda: Lanjutan Pembahasan Persiapan BBI Lampung - Lagawi Fest;
r. Rapat Pimpinan dengan Menteri Perindustrian dengan agenda Pembahasan Hasil Rakor Kebijakan Pengendalian Minyak Goreng;
s. Rapat Pimpinan dengan Menteri Perindustrian dengan agenda Pembahasan Revisi Permenperin nomor 57 tahun 2006.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Inspektorat I

- Evaluasi SAKIP pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- Koordinasi pengawasan penyediaan MGSC untuk kebutuhan masyarakat oleh PT Wilmar;
- Pengawasan penyediaan MGSC pada PT Multimas Nabati Asahan dan distributornya;
- Pengawasan penyediaan MGSC pada PT Asianagro Agungjaya dan distributornya;
- Pengawasan penyediaan MGSC pada PT Ivo Mas Tunggal, PT Pelita Agung Agrindustri dan PT Sari Dumai Sejati dan distributornya;
- Pengawasan penyediaan MGSC pada PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk. Dan distributornya, PT Sinar Alam Permai dan distributornya, pada Energi Unggul Persada dan distributornya;
- Koordinasi Rencana Aksi dan Survei Layanan Itjen pada STTT Bandung
- Pelatihan Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Perwilayahan Industri.

- Pemantauan Pemanfaatan mesin dan peralatan industri 4.0 pada Politeknik STTT Bandung;
- Training Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif untuk mendeteksi Fraud;
- Mengikuti *Certified Ice Breaker, Effective Technique for Internal Audit;*
- Webinar Reformasi Tata Kelola Belanja Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD);
- Webinar *Risk Management Based on* ISO 31000:2018;
- Webinar Kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji untuk Kemaslahatan Umat;
- Webinar Peningkatan Kapasitas *Advisor* dan *Stakeholder* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Webinar *Flood Risk Assessment in Urban Area*;
- Webinar Sambungan Komponen *Precast* pada Sistem *Half Slab Precast* untuk Pelat Beton Bertulangan Dua Arah;
- Webinar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Webinar *Professional Public Speaking.*
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2021 pada SMK SMTI Banda Aceh;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2021 pada SMK SMTI Pontianak;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2021 pada BDI Denpasar;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2021 pada AKOM Bantaeng;

- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2021 pada pada Politeknik Morowali;
- Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Risk Management Officer (*CRMO) Tahun 2022 dari BPKP;
- Survei Pendahuluan Audit BPSDMI;
- Pendampingan Audit pada SMK SMTI Banda Aceh;
- Koordinasi Tim Audit Kinerja dan Pengelolaan BMN pada AKOM Bantaeng;
- Rapat Tindaklanjut Terkait Tanah Kementerian Perindustrian yang dikuasai Masyarakat di STTT Bandung;
- Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;mkk
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2021 pada Sekretariat Jenderal;
- Webinar Peningkatan Kapasitas Pengadaan (PenTas) Pengadaan : Sharing Session Penyelenggaraan Katalog Sektoral;
- Webinar Nasional 2022 *Cyber Security* : *An Internal Audit Perspective;*
- Webinar Pelatihan Profesional *governance, Risk Management dan Compliance;*
- Narasumber Penyusunan Manajemen Risiko pada Biro Keuangan Kementerian Perindustrian;
- Webinar Reformasi Tata Kelola Desentralisasi Fiskal dalam Undang - undang HKPD;
- Reviu PAPBJ TW II TA 2022 pada BPSDMI;
- Webinar Peningkatan Kapasitas (PenTas) Stakeholder Pengadaan "Optimalisasi Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan BUMDES dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- Webinar Potensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Industri Kecil dan Menengah;
- Webinar Perluas Jangkauan Pasar Melaluli Katalog Digital dan Website.

b. Inspektorat II

- Audit Dana Dekonsentrasi di Provinsi Riau pada Disperindag Pekanbaru;
- Audit Dana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta pada Disperindag Jakarta;
- Cek Fisik dalam rangka pemantauan penyelesaian Aset BMN Ditjen IKMA di BBLM Bandung;
- Pendampingan Kegiatan Fasilitasi Bimbingan Penerapan Sertifikasi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP);
- Penilaian SAKIP BPIPI Sidoarjo;
- Pengawasan penyediaan MGSC untuk kebutuhan masyarakat oleh PT Wilmar, PT Selago Makmur Plantation dan distributornya, PT Primus Sanus Cooking Oil Industry dan distributornya, PT Multimas Nabati Asahan dan distributornya, PT Sinar Mas Agro Resources dan Technology Tbk (PT SMART Tbk) dan distributornya, PT Permata Hijau Palm Oleo dan dsitributornya;
- Audit Dana Dekonsentrasi pada Disperindag Semarang, Jawa Tengah; Disperindag Medan, Sumatera Utara; Disperindag Provinsi DKI Jakarta; Disperindag Palu, Sulawesi Tengah; Disperindag Mataram, NTB;
- Audit Dana Dekonsentrasi pada Disperindag Provinsi Banten;
- Audit Dana Dekonsentrasi pada Disperindag Provinsi Jawa Barat;
- Workshop monitoring dan evaluasi TKDN dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian/Lembaga.
- Pengawalan kegiatan pembelian tanah BPIPI di Sidoarjo, Jawa Timur;

- Pemantauan Minyak Goreng Curah di Kota Ambon, Maluku;
- Audit Dana dekonsentrasi pada Disperindag Provinsi Bali;
- Audit Dana Dekonsentrasi pada Disperindag Provinsi Sulawesi Barat;
- Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP di Lingkungan APIP K/L Mitra kerja Kedeputian Bidng Perekonomian dan Kemaritiman.
- Kunjungan Pemantauan Industri pada PT Meiloon Technology Indonesia di Subang, Jawa Barat;
- Pengawalan Kegiatan Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat TA. 2022;
- Pengawalan Rencana Pengadaan Tanah BPIPI TA. 2022;
- Pengawalan Kegiatan Gernas BBI #LagawiFest 2022 di Lampung;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Usulan Atas Masukan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Koordinasi Pengawasan pada BPKP di Jakarta.

c. Inspektorat III

- Pengawasan penyediaan MGSC pada PT Primus Sanus Cooking Oil Industry dan distributornya; PT Salim Ivomas Pratama dan distributornya; PT Kutai Refinery Nusantara dan distributornya; PT Sinar Alam Permai dan distributornya;
- Pelatihan Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- Koordinasi Pelaksanaan pengawalan pembangunan Gedung Fiforfarmaka pada satker BBSPJIKFK;
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan APIP Tahun 2022.
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon;
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya;
- Pengawalan pekerjaan konstruksi TA 2022 pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim Makassar.

- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda;
- Pengawalan kegiatan Penilaian Tarif Sewa di Pabrik Gula PT Perkebunan Nusantara IX (PG Rendeng)
- Pengawalan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Fraksionasi Tandan Kosong Kelapa Sawit Pada Skala Pilot pada BBSPJIA (Kerjasama BBSPJIA dan BPDPKS)
- Pelatihan dan Seritifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO) Batch 1 Tahun 2022 dari BPKP;
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 pada Satker BBSPJIA Bogor;
- Pengawalan Pekerjaan Konstruksi TA 2022 pada BBSPJPPI Semarang;
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang;
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon;
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya;
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada Satker BBSPJPPI Semarang;
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada Satker BSPJI Bandar Lampung;
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada Satker BBSPJIHPMLM Makassar;
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada Satker BSPJI Banda Aceh;
- Audit Program dan Kegiatan TA 2021 Pada Satker BSPJI Banjarbaru;
- Pengawalan Kegiatan Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat TA. 2022;
- Pelatihan dan Sertifikasi *Big Data Analyst Batch* 3 Tahun 2022 dari BPKP;

- Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas BMN pada Satker BBSPJI Logam Mesin, Tekstil, serta Keramik dan Mineral Non Logam, serta BBSPJI Tekstil (merujuk pada surat nomor B1484/BSKJI.1/KU/V/2022);
- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satker BSPJI Keramik dan Mineral NonLogam Bandung;
- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satker BSPJI Selulosa Bandung;
- Melaksanakan pembangunan pondasi gedung fitofarmaka pada BSPJIKFK cek fisik progres pekerjaan Jakarta;
- Koordinasi Pembahasan Hasil Cek Fisik Progres Pekerjaan Gedung Fitofarmaka dengan Tenaga Ahli di BBSPJIBBT Bandung;
- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satker BBSPJI Logam dan Mesin Bandung;
- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satker BBSPJIT Bandung.

d. Inspektorat IV

- Pengawalan dan koordinasi pertemuan ke-1 TIIWG Presidensi G20 Indonesia;
- Monitoring harga pasar MGSC di Kota Bandung dan menghadiri Rapat Kerja Sinkronisasi data PPIH;
- Pengawasan penyediaan MGSC pada PT Bina Karya Prima dan distributornya; PT Mieki Oleo Nabati Industri dan distributornya; PT Incasi Raya dan distributornya; PT Kutai Refinery Nusantara dan distributornya.
- Pengawalan kegiatan *Launching* dan Sosialisasi Program Restrukturisasi M/P Tahun Anggaran 2022
- Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pokja Pemantauan P3DN;
- Koordinasi terkait Partisipasi Indonesia sebagai *Partner Country Hannover Messe* 2023;
- Pembahasan Perjanjian Pembiayaan Penyediaan MGSC untuk kebutuhan masyarakat usaha mikro dan usaha kecil antara BPDPKS

dengan industry minyak goreng curah dan Pembahasan Informasi Publik di aplikasi SIMIRAH;

- Pengawasan MGSC pada PT Berkah Emas Sumber Terang dan distributornya; PT Sabda Tirta Selaras dan distributornya; PT Darmex Oil & Fats dan distributornya;
- Pengawalan kegiatan Evaluasi Realisasi BMDTP Tahun Anggaran 2021 sektor industri Plastik dan Karet;
- Evaluasi SAKIP Unit Eselon II Ditjen IKFT, KPAII, Industri Agro, Pusat P3DN dan PPIH.
- Pengawalan Kegiatan Hannover Messe Tahun Anggaran 2022 Serta Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Atase Perindustrian di Brussel TA 2021;
- Rapat Tim Teknis I Permohonan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain;
- Uji Petik Bantuan Alat/Mesin Obat Tradisional Tahun 2018-2020 pada CV Nadis Herbal;
- Uji Petik Kegiatan RestrukturisasiMesin/Peralatan Direktorat ITKAK di Bandung;
- Webinar Perluas Jangkauan Pasar Melaluli Katalog Digital dan Website;
- Pengawalan dan Monitoring Pemanfaatan Bantuan Alat/Mesin Obat Tradisional Tahun 2018-2020 pada CV Centerindo Kurnia Tritama;
- Monitoring Pemanfaatan Bantuan Alat/Mesin Obat Tradisional Tahun 2018-2022 pada CV Centerindo Kurnia Tritama;
- Uji Petik Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil;
- Koordinasi Penyaluran Minyak Goreng Curah oleh PT BKP Gresik;
- Uji Petik Audit Kinerja Ditjen IKFT pada Penerapan SNI Wajib dan Rekomendasi Bahan Baku di Tuban, Gresik, dan Surabaya;
- Uji Petik Audit Kinerja Ditjen IKFT untuk Pendampingan Implementasi Industri di Cirebon dan Bandung;

- Rapat Tim Teknis II Pembahasan Permohonan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain;
- Menghadiri Acara Harvesting Lagawi Fest dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Lampung;
- Konsinyering Pemantauan P3DN Proyek GRR Tuban;
- Pembahasan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Industri Komoditas Beras Pecah 100%, Beras Ketan 100% dan Jagung dalam rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Beras dan Jagung;
- Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan Untuk Industri Dalam Rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Perikanan Tahun 2023;
- Konferensi Internal Audit 2022 Indonesia TeamMate Day;
- Narasumber Rapat Pembekalan Penyusunan Peta Risiko Ditjen KPAII Tahun 2022;
- Penyusunan Profil Kinerja Industri Kimia Hulu dan Analisis Kemampuan Produksi dan Kebutuhan Dalam Negeri untuk Komoditas Garam Industri, Pupuk dan Bahan Baku Plastik;
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Addendum Kontrak Pihak III;
- Rapat Pembahasan Terkait Pengadaan Masker Tahun 2021;
- Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Atase Kementerian Perindustrian;
- *Training Online Technique for Internal Audit General*, IT and Cybersecurity;
- Rapat Capaian Kinerja Direktorat Akses Industri Internasional Triwulan II Tahun 2022;
- Rapat Penyusunan Peta Resiko Dit KIUI Tahun 2022.

3. Kegiatan Dukungan Pengawasan

1. Penyusunan laporan yang diselesaikan di Semester II tahun 2022 adalah laporan temuan hasil pengawasan eksternal (hasil pengawasan eksternal oleh BPK) Semester I dan laporan pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Triwulan IV Tahun 2021, serta Laporan Klinik Konsultasi Semester I;
2. Pengembangan SDM

   Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan II (April-Juni 2022) adalah sebagai berikut:

   a. Penyampaian Data Peningkatan Kapabilitas APIP (IACM) dan Evaluasi RB Inspektorat Jenderal;
   b. Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional;
   c. Pleno Penilaian Angka Kredit Semester II Tahun 2021 bersama BPKP;
   d. Monitoring dan evaluasi Diklat Pengembangan Pegawai Itjen;
   e. Monitoring dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Inspektorat Jenderal Tahun 2021;
   f. Penyusunan Peta Risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal;
   g. PKS Penggunaan Aplikasi Sistem Bina Jabatan Auditor Berkualitas (SiBijak);
   h. Rapat Pembahasan Peningkatan Kapabilitas APIP per elemen (Peningkatan SDM);
   i. Penyusunan Surat Keputusan Payung Tim Assessor Peningkatan Kapabilitas APIP;
   j. Penerbitan 2 SK KPA, yaitu :
      1) Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Narasumber dalam rangka sosialisasi secara virtual Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
      2) Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM.

k. Penerbitan 16 SK Inspektur Jenderal, yaitu:

1) Perubahan pertama atas keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Arsip dan Ketatausahaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2022,
2) Perubahan pertama atas keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Perumusan Peraturan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2022,
3) Perubahan pertama atas keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 19 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Pengelola Website di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian,
4) Pembentukan Tim Pengawas Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS,
5) Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6) SK Irjen No. 95 Tahun 2022 : Pembentukan Tim Asesor PMPRB 2022
7) SK Irjen No. 96 Tahun 2022 : Pelaksanaan Peningkatan Awareness P3DN dan Koordinasi Pemantauan Implementasi TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa pada K/L di Lingkungan Itjen
8) SK Irjen No. 99 Tahun 2022: Pengangkatan Pengemudi di Lingkungan itjen Kemenperin Tahun 2022
9) SK Irjen No. 103 Tahun 2022 : Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Narasumber dalam rangka temu teknis pengelolaan atau penyelesaian tindak lanjut saldo temuan hasil Pemeriksaaan BPK RI di lingkungan Kementerian Perindustrian
10) SK Irjen No. 104 Tahun 2022 : Penunjukan Pengelola Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Inspektorat IV Tahun 2022

11) SK Irjen No. 107 Tahun 2022: Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Narasumber dalam rangka Sosialisasi Penilaian IACM di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
12) SK Irjen No. 108 Tahun 2022: Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Narasumber dalam rangka PKS Penggunaan SIBIJAK di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
13) SK Irjen No. 109 Tahun 2022: Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2022
14) SK Irjen No. 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim PPerumus Peraturan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2022
15) SK Irjen No. 111 Tahun 2022: Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Internal Audit Capabiliti Models/ IACM) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2022
16) SK Irjen No. 112 Tahun 2022 : Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2022

3. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal

Terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dilakukan selama Triwulan II (April-Juni 2022) adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester I Tahun 2022. Laporan dalam proses penyusunan Sesuai Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang telah ditindaklanjuti;
b. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Triwulan I Tahun 2022. Laporan Telah Disusun Sesuai Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal yang telah disampaikan;
c. Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, selesai dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022;
d. Rapat Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapabilitas APIP (IACM) pada tanggal 11 April 2022;
e. Koordinasi dengan Unit Eselon I terkait Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
f. Koordinasi dengan Pusat Data Informasi Terkait Pembukaan Akun PMPRB untuk Tim Asesor;
g. Penilaian Panel I, II dan III PMPRB Insektorat Jenderal. Hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 91,5 untuk tahun 2021.
h. Nilai Penguatan Pengawasan diperoleh dari reform nilai pengungkit. Hasil yang diperoleh adalah 89,92%
i. Persiapan Penyusunan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal;
j. Penyusunan Rencana Kerja RB Inspektorat Jenderal tahun 2022;
k. Persiapan Pemantauan Rencana Aksi Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

4. Penyelesaian Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2022, yaitu:

a. Evaluasi Penilaian SAKIP Unit Eselon II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan hasil berdasarkan urutan nilai tertinggi sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Evaluasi SAKIP Unit Eselon II Inspektorat Jenderal

No	Unit Kerja	Nilai	Predikat	
1	Inspektorat II	81,30	A	Memuaskan
2	Sekretariat Inspektorat Jenderal	80,15	A	Memuaskan
3	Inspektorat I	79,30	BB	Sangat Baik
4	Inspektorat III	78,25	BB	Sangat Baik
5	Inspektorat IV	77,85	BB	Sangat Baik

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian SAKIP pada Inspektorat Jenderal Nomor 118/IJ-IND/LHE/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 77,80 dari 100, dengan predikat BB atau Sangat Baik.

b. Capaian Kinerja dan progressnya telah selesai di input pada Smart DJA dan E-Monev BAPPENAS hingga Bulan Juni 2022.

c. Persiapan pemantauan Rencana Aksi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

d. Pengajuan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM (Surat dari Menperin ke MenPANRB);

e. Input LKE Satker yang Diusulkan WBK/WBBM 2022 ke aplikasi PMPZI Kementerian PANRB;

f. Dalam proses penyusunan Laporan APIP Semester I tahun 2022.

Adapun progres capaian dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal pada Triwulan II diinformasikan pada tabel berikut :

Tabel 7. Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal TW II 2022

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,3%	Masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK	
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	90%	Berdasarkan Nota Dinas No.5/IJ.IND.1/KK/V/2022 , terdapat 2 pengaduan masyarakat berkadar pengawasan secara online dari total 108 pengaduan hingga 30 April 2022 dan saat ini masih dalam proses pelaksanaan	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	92%	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sampai dengan Triwulan II 2022 mencapai 72% dengan jumlah rekomendasi sebanyak 635 dan jumlah tindak lanjut sebanyak 428	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	72%	Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenperin Tahun 2022 dengan nota dinas nomor 152/IJ-IND/PW/VI/2022Telah tercapai sebesar 89.92%	
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Dalam tahap persiapan data yang diperlukan. Penilaian baru akan di mulai pada bulan Juli	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Berdasarkan hasil Survey TW II: a. Inspektorat I : 93,33% b. Inspektorat II: 97,82%	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Keterangan
				c. Inspektorat III: 89 % d. Inspektorat IV: 77,67% Maka, Capaian Inspektorat Jenderal hingga TW II: 89,45%	
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Penilaian IACM masih dalam proses pelaksanaan	
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	78%	Masih dalam poses pelaksanaan. Pada Inspektorat II, pada triwulan II telah dilakukan audit pada dana dekonsentrasi dengan sampling 11 provinsi, maka realisasi capaian kinerja dari bulan Januari sampai dengan Juni sebesar 81,06 %.	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	Hingga Triwulan II, Realisasi Belanja produk dalam negeri Inspektorat Jenderal yaitu Rp10.699.300.016,00 atau sekitar 48,17% dari pagu PDN	
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas Regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	76%	Masih dalam proses perencanaan pelaksanaan. Belum terlaksananya survey Efektivitas regulasi yang diterapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.4	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) nomor 118/IJ-IND/LHE/V/2022Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal yaitu 77,80 dengan predikat BB	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Keterangan
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahuan dengan PKPT	90%	Sebagian besar Kegiatan pengawasan pada seluruh Inspektorat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada dokumen PKPT. Sampai dengan bulan Juni 2022 belum ada perubahan PKPT yang disampaikan. Berdasarkan Laporan Inspektorat I, capaian mencapai 96%	
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Masih dalam proses pelaksanaan. Berdasarkan laporan : a. Inspektorat I, capaian hingga tw II ini 80% b. Inspektorat II, capaian sampai dengan TW II, yaitu 95,36%	
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	72%	Pada akhir Triwulan II, telah dilaksanakan Survey terkait tingkat dukungan manajemen Inspektorat Jenderal. Rata-rata nilai yang diperoleh adalah 86,19 (Sangat Puas) terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat Inspektorat Jenderal	
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	92%	Telah selesai dilaksanakan penilaian pada tanggal 15 Mei 2022, dan Berdasarkan Hasil PenilaianMandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenperin Tahun 2022 dengan nota dinas nomor	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW II	Keterangan
				152/IJ-IND/PW/VI/2022 dengan hasil nilai 91,52%	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	75	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di semester I tahun 2022 mencapai 81,19 (belum nilai final yang didapat di akhir tahun)	🟡
8.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	Masih dalam proses persiapan pelaksanaan	🟡
		Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	65%	Hingga TW II ini, baru ada 3 PKS yang dilaksanakan dan Masih dalam proses pelaksanaan hingga akhir tahun	🟡
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	76%	Realisasi hingga TW II yaitu 29%, namun belum final karena masih akan terus dilaksanakan hingga akhir tahun.	🟡

Keterangan :

🟢 : Telah tercapai

🟡 : Dalam proses pelaksanaan

🔴 : Tidak tercapai

III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan II Tahun 2022, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal terdapat hambatan dan kendala, antara lain:

1) Terdapat blokir anggaran yang nilainya cukup besar yaitu sekitar 29,57% dari total dana yang tersedia saat ini.
2) Masih menunggu proses revisi anggaran ke-6 (revisi buka blokir), hal ini mengakibatkan tertundanya pengajuan pencairan beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas, sehingga berpengaruh pada tidak tercapainya target realisasi 60% pada bulan Juni ini.
3) Realisasi fisik pada Aplikasi PP39 belum tersedia karena terdapat kendala yang belum diperbaiki pada aplikasi tersebut.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II, Inspektorat Jenderal mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Telah diserahkan segala dokumen yang diperlukan untuk mempercepat proses revisi kepada pihak DJA.
2. Bekoordinasi dengan Pusdatin untuk memperbaiki aplikasi PP 39 yang ada pada intranet;
3. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar realisasi dapat tercapai 80% pada Triwulan III;

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2022 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 (Januari-Juni) mencapai Rp 17,939,521,748, - atau 44.14 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 40,643,630,000, -. Dengan dengan adanya jumlah yang di blok atau di revisi sebesar Rp 5,181,546,000,- maka dana yang tersedia saat ini Rp 17,522,562,252,-. Anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan. Sehingga di akhir tahun 2022, perencanaan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal dapat tercapai dengan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum seluruhnya dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan pelaksanaan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Informasi capaian kinerja Triwulan II dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2022 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM
Telp : 5255509

NOTA DINAS

Nomor : 202/IJ-IND/PR/VII/2022

Yth	:	Menteri Perindustrian
Dari	:	Inspektur Jenderal
Hal	:	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2022
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Tanggal	:	14 Juli 2022

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini kami laporkan bahwa capaian realisasi penyerapan anggaran pada Inspektorat Jenderal pada Triwulan II Tahun 2022 yaitu Rp17.939.521.748,00 atau sebesar 44,14 % dari pagu Rp40.643.630.000,00.

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Penyediaan Minyak Goreng Sawit Curah (MGSC);
2. Audit Program & Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas;
3. Pengawalan Pameran Hannover Messe;
4. Penilaian SAKIP seluruh unit di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
6. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI);
7. Koordinasi Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal;

8. Pengawalan Renovasi Gedung Inkubator Bisnis dan Optimalisasi Teknologi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim Makassar;
9. Kegiatan Workshop Monitoring dan Evaluasi TKDN dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian/Lembaga.

Demikian kami laporkan, atas perkenan dan arahan Bapak Menteri kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Inspektur.